

Politik Identitas dan Krisis Kebhinekaan: Perspektif Moral Kebangsaan Buya Syafii Maarif

Nur Rahmad Teguh Septiyadi¹, Noor Hasanah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

* E-mail: norrahmadteguh@gmail.com, enhasanah@uin-antasari.ac.id

* corresponding author

Kata Kunci

Politik identitas,
pluralisme,
demokrasi, agama

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena politik identitas dan implikasinya terhadap masyarakat majemuk di Indonesia dalam perspektif Buya Syafii Maarif. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, peneliti menganalisis konstruksi ideologis dan sosio-politik politik identitas, khususnya dalam konteks kontestasi elektoral. Buya Syafii berpandangan bahwa politik identitas tidaklah berbahaya selama dikelola dalam kerangka Pancasila dan cita-cita persatuan nasional. Namun, penyalahgunaannya oleh elite politik demi kepentingan pragmatis justru mengancam kohesi sosial dan integritas demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi politik berbasis identitas (khususnya yang mengeksploitasi sentimen keagamaan) telah memperparah polarisasi, marginalisasi, dan mempersempit ruang demokrasi yang inklusif. Pemikiran Buya Syafii menawarkan arah etik dalam merespons politik identitas melalui moderasi, kepemimpinan bermoral, dan kesadaran kebangsaan. Artikel ini memberi kontribusi penting dalam diskursus etika politik dan pluralisme di Indonesia kontemporer.

Keywords

Identity politics,
pluralism,
democracy,
religion

Abstract

This research explored the phenomenon of identity politics and its implications for pluralistic society in Indonesia from the perspective of Buya Syafii Maarif. Based on a qualitative approach, the researcher analyzed the ideological and socio-political construction of identity politics, especially in the context of electoral contestation. Buya Syafii believes that identity politics is not dangerous as long as it is managed within the framework of Pancasila and the ideals of national unity. However, its misuse by political elites for pragmatic interests threatens social cohesion and democratic integrity. The research findings shows that identity-based political strategies (especially those that exploit religious sentiments) have exacerbated polarization, marginalization, and narrowed the space for inclusive democracy. Buya Syafii's thought offers an ethical direction in responding to identity politics through moderation, moral leadership, and national awareness. This article contributes significantly to the discourse on political ethics and pluralism in contemporary Indonesia.

Pendahuluan

Peningkatan kesadaran beragama bagi umat Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan sebuah fenomena politik yang baru. Fenomena yang dihasilkan dari hal ini dapat dilihat bagaimana identitas keagamaan dapat menjadi sebuah motivasi, inspirasi bahkan konflik politik. Politik identitas Islam sendiri melibatkan banyak aspek termasuk identitas sosial, budaya, bahkan pemahaman dalam beragama. Selain itu politik identitas yang terjadi di negara-negara dengan mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam, juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik itu dampak positif, maupun dampak negatif (Hawati et al., 2024).

Menjelang pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan istilah pemilu merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan demokrasi di sebuah negara, karena dengan pelaksanaan pemilu masyarakat dapat melakukan proses kedaulatan (Fitriana & Budyatmojo, 2022). Selain itu pemilu juga menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat dan pemerintahan dalam dunia politik.

Bagi Indonesia, pemilu merupakan sebuah konsep dan perwujudan dari demokrasi *procedural*. Oleh karena di zaman sekarang tidak ada negara yang menganut sistem demokrasi penuh, yang langsung dijalankan oleh rakyat dan sepenuhnya untuk rakyat, maka pemilu merupakan jalan paling ampuh bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi serta keikutsertaan masyarakat dalam proses menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis (Dinar Astuti et al., 2023). Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak delapan kali, dengan pertama kali di tahun 1955 yang menghasilkan badan konstitusi dan DPR. Pemilu pertama ini merupakan peristiwa terbesar kedua yang dialami bangsa Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 (Topo Santoso, Ida Budiarti, 2018).

Dalam penyelenggaraannya, pemilu tidak terlepas dari orientasi terhadap identitas, yang meliputi identitas agama, gender, suku, ras, budaya, adat istiadat dan antar golongan. Hal ini dapat dilihat dari politisi yang maju dalam kontestasi pemilu, yang tidak jarang di antara mereka menggunakan bermacam identitas tersebut sebagai alat dalam berpolitik (Dinar Astuti et al., 2023). Dalam hal ini, identitas keagamaan dimainkan semakin signifikan dalam kontestasi politik. Di tengah kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh keberagaman agama, pemahaman dan penerapan identitas keagamaan sering kali menjadi faktor pendukung dalam proses politik.

Pemilu 2024 menghadirkan corak politik identitas keagamaan yang sangat kental, salah satunya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 01, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (selanjutnya disebutkan Anies-Muhaimin atau dengan akronim AMIN). Sebagaimana yang dilansir oleh antaranews.com pada tanggal 28 Januari 2024, bahwa sejumlah ulama di wilayah Jawa Barat memberikan dukungan mereka kepada pasangan Anies dan Muhaimin, sehingga hal ini menarik simpati dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk mendukung keduanya.

Idris Sandiwa selaku ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat menuturkan dukungan dari *ijtima'* ulama se-Jawa Barat akan memperkuat pasangan Anies-Muhaimin dalam menghadapi Pemilu 2024. Kemudian Idris juga menuturkan hasil *ijtima'* tidak hanya sebagai bentuk restu dan dukungan, tetapi juga sekaligus doa agar pasangan Anies-Muhaimin bisa menjadi pemimpin yang memberikan manfaat dan dalam kepemimpinannya dapat menolong sesama. Tingginya dukungan terhadap pasangan AMIN di Jawa Barat setidaknya dapat dilihat ketika pasangan calon ini melakukan kegiatan di beberapa wilayah Jawa Barat termasuk di Depok (antaranews.com, 2024).

Penelitian dan penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan Buya Syafii Maarif terhadap politik identitas. Selain itu, juga untuk menganalisis bagaimana implikasi dari praktik politik identitas dalam keberagaman masyarakat. Kegiatan ini sangat relevan untuk dilakukan, mengingat banyaknya praktik politik identitas yang dilakukan di Indonesia dan hal ini cukup berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun telah banyak artikel ilmiah yang membahas tentang politik identitas, namun kajian-kajiannya belum sampai pada implikasinya terhadap masyarakat. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya itu, pada penelitian ini penulis mengkaji pemikiran Buya Syafii Maarif terhadap politik identitas dan implikasinya pada masyarakat.

Metode

Mengingat relevansi terhadap penelitian, maka peneliti menggunakan metode kualitatif untuk penelitian ini. Metode kualitatif sendiri merupakan metode yang berfokus pada upaya memahami fenomena sosial maupun perilaku masyarakat (Panjaitan et al., 2023). Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena yang sering terjadi menjelang pemilu. Peneliti juga melakukan proses penyelidikan agar dapat memahami masalah sosial yang terjadi dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan untuk dianalisis lebih lanjut (Samsu, 2007). Adapun pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka. Pada prosesnya, peneliti berfokus mencari data-data yang menunjang terungkapnya objek kajian melalui artikel-artikel, buku-buku, atau catatan lainnya yang dapat dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat Buya Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif atau yang biasa dikenal juga dengan Buya Syafii Maarif lahir pada 31 Mei 1935 di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Melayu yang merupakan seorang kepala suku dan saudagar. Sementara ibunya bernama Fathiyah.

Saat masih anak-anak, Syafii menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR). Lalu dalam belajar agama, dirinya mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Balai Tengah, Lintau, Sumatera Barat.

Saat berusia 19 tahun sekira tahun 1954, ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Muallimin Yogyakarta sampai tahun 1956. Selama belajar di Madrasah Muallimin Yogyakarta beliau sangat aktif dalam organisasi kependuan Hizbul Wathan dan pernah menjadi pemimpin redaksi Majalah Sinar.

Pada level pendidikan tinggi, dirinya melanjutkan di Universitas Cokroaminoto (Yogyakarta), lalu ke IKIP Yogyakarta. Setelahnya berlanjut ke Ohio State University di (Amerika Serikat), kemudian di Chicago University (Amerika Serikat).

Buya Syafii Maarif pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1998–2005. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP). Saat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dirinya mulai aktif menjadi tokoh bangsa yang sering mengutarakan kritik yang objektif dan lugas terhadap kepemimpinan dan kondisi bangsa, khususnya melalui tulisan-tulisannya yang terpublikasi di berbagai media massa dan buku-buku.

Pada tahun 2008 Buya Syafii Maarif mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina (Muhammadiyah, 2022). Selain itu, dirinya juga mendapatkan penghargaan Habibie Award pada tahun 2010 dari The Habibie Center.

Buya Syafii Maarif aktif menjadi penulis tetap di kolom “Resonansi” Harian Umum Republika sejak tahun 2004. Pada awal era reformasi, dirinya aktif dalam Gerakan Moral Anti Korupsi bersama H.S. Dillon, K.H. A. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) yang dideklarasikan pada Oktober tahun 2003 (Kemenag, n.d.).

Pada tanggal 27 Mei 2022 Buya Syafii telah wafat, di usia 86 tahun, di kediamannya yang berlokasi di kawasan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Reputasinya diketahui sangat baik di masyarakat. Ia dikenal sebagai sosok intelektual dan ulama yang banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup Muhammadiyah. Atas besarnya kontribusi inilah, menjadikan dirinya diberi gelar “Buya”, meskipun tidak jarang gelar tersebut dipelesetkannya sebagai bahan bercanda untuk menghilangkan kesan feodalistis di tengah masyarakat (Ismail & Hana, 2024).

Definisi Politik Identitas

Menurut Cambridge Dictionary, istilah politik memiliki tiga makna utama: *pertama*, sebagai aktivitas yang melibatkan pemerintah, pembuat undang-undang, atau pihak yang berupaya memengaruhi sistem pemerintahan; *kedua*, sebagai peran atau tanggung jawab dalam memegang kekuasaan negara; dan *ketiga*, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari cara suatu negara diatur. Secara etimologis, identitas merujuk pada jati diri atau karakteristik khas yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok, yang membedakannya dari individu atau kelompok lain. Dengan demikian, politik identitas merupakan suatu paham atau pendekatan politik di mana sekelompok individu dengan identitas yang sama baik berdasarkan ras, agama, etnis, status sosial, maupun budaya dengan kecenderungan memperjuangkan kepentingan kelompok mereka sendiri, sering kali tanpa mempertimbangkan kepentingan atau perspektif dari kelompok politik lain yang lebih luas (Mubarok, 2023).

Pada konteks ini, politik identitas tidak lagi sekadar berkaitan dengan rasa memiliki terhadap hal-hal yang terkait dengan seseorang (*belonging*), tetapi telah mengalami pergeseran fungsi menjadi alat strategis dalam dunia politik untuk menarik simpati publik. Dalam praktiknya, identitas sering kali dimodifikasi oleh para kandidat, terutama dalam kontestasi politik di tingkat lokal. Situasi ini mendorong munculnya praktik politisasi etnis, di mana para kandidat menggunakan simbol-simbol identitas kultural atau etnis tertentu dengan klaim mewakili kelompok tersebut. Akibatnya, sentimen etnis dijadikan sebagai instrumen untuk membangun basis dukungan elektoral dari pemilih yang memiliki identitas serupa (Baidhawi & Novianti, 2022).

Nyatanya, identitas memang terbukti efektif untuk digunakan dalam membendung dukungan dan simpati tertentu (Castells, 2011). Bagaimanapun, identitas selalu memiliki dampak politis (Agius & Keep, 2018). Itulah mengapa politik identitas menjadi salah satu strategi pilihan yang acapkali diutamakan untuk digunakan di dalam kontestasi politik.

Kesamaan ras, agama, etnis, status sosial, maupun budaya menciptakan rasa simpati dan nasib bersama yang perlu diperjuangkan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di semua negara. Bahkan di dalam sebuah masyarakat kecil, politik identitas digunakan untuk menjaring massa demi menguatkan posisi.

Politik Identitas dalam Konteks Indonesia

Pasca kemerdekaan, ketika kolonialisme tak lagi menjadi musuh bersama, politik identitas mulai mencuat dalam bentuk persaingan ideologi: Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Kaum nasionalis, yang banyak berasal dari tanah Jawa dan terinspirasi oleh gerakan Budi Utomo, mendorong identitas kebangsaan berbasis budaya lokal. Kelompok Islam menuntut agar Islam dijadikan dasar negara, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sementara itu, kelompok Marxis yang berpendidikan Barat mengusung ide negara yang egaliter dan demokratis. Ketegangan paling tajam terjadi antara nasionalis dan Islamis, yang memuncak dalam perdebatan di sidang BPUPKI dan berujung pada kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta, termasuk penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila yang terkait syariat Islam. Dalam perumusan Pancasila mulai dari gagasan Soekarno, Piagam Jakarta, hingga pengesahan pada 18 Agustus 1945, menunjukkan transformasi penting dalam membentuk wajah religiositas bangsa Indonesia. Pancasila yang disahkan pada tanggal tersebut menegaskan prinsip kesetaraan bagi seluruh pemeluk agama dan etnis. Tidak ada kelompok yang diistimewakan atau dipinggirkan. Sila kelima dalam Pancasila secara eksplisit menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara, baik dalam hukum maupun dalam ranah politik. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya tidak mengakui dikotomi antara mayoritas dan minoritas (Supratikno, 2023).

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto meredam politik identitas dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kontrol sosial dan politik yang ketat, negara memonopoli definisi identitas nasional dan melabeli pandangan alternatif sebagai subversif. Namun,

pendekatan represif ini hanya efektif selama rezim berkuasa. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto di tahun 1998, politik identitas kembali mencuat dalam berbagai bentuk ekspresi sosial dan politik (Supratikno, 2023).

Kemunculan fenomena politik identitas bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah. Politik identitas kerap kali mewarnai panggung politik di Indonesia. Negara ini memiliki letak geografis yang strategis, sejak dahulu telah menjadi wilayah dengan kehidupan yang pluralistis. Keberagaman yang ada merupakan realitas yang tak dapat disangkal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa ini, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dipengaruhi oleh unsur luar. Kemunculan politik identitas di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang diwarnai oleh rasa ketidakadilan dan perebutan hak yang dirasakan oleh berbagai kelompok. Kemunculan praktik politik identitas sering kali dilatarbelakangi dari tiga identitas sosial, yaitu; kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang kemudian membentuk gerakan perlawanan, sebagai kelompok yang mendominasi dalam masyarakat, dan kelompok revolusioner yang bertujuan untuk melakukan perubahan. Masing-masing kelompok sering kali mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling berhak atas perlakuan setara, sehingga memperkuat garis pemisah berdasarkan identitas tertentu. Dalam konteks ini, politik identitas menjadikan perbedaan sebagai tolok ukur utama, yang tidak hanya dikenali tetapi juga ditegaskan secara tajam. Jika ketegangan identitas semacam ini dibiarkan tanpa penanganan yang bijak, bukan tidak mungkin akan mengancam stabilitas dan kohesi sosial dalam kehidupan bernegara (Syahdan, 2024).

Isu politik identitas sering kali menciptakan benturan antar kelompok dengan identitas agama dan identitas nasionalis. Keduanya memiliki gagasan pemikiran yang diklaim benar dan unggul dalam kontestasi politik. Jika kita melihat kembali sejarah panjang bangsa Indonesia, dari perjuangan melawan penjajah hingga lahirnya kemerdekaan dan terbentuknya ideologi negara, terlihat jelas bahwa nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting. Nilai-nilai ini ikut membentuk fondasi kehidupan berbangsa yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Tidak bisa dipungkiri, Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai keagamaan yang luhur dan menjadi titik temu berbagai keyakinan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kemunculan politik identitas merupakan bagian dari dinamika politik yang tak terhindarkan dalam masyarakat yang hidup dalam pluralisme. Namun, pluralistis tersebut kerap dibayangi oleh ketimpangan dan ketidakadilan, yang kemudian mendorong masing-masing kelompok identitas untuk mengklaim hak dan kepentingannya sendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial di masyarakat, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi ruang konflik yang lebih luas dan mengancam stabilitas negara (Hermansyah, 2022).

Ketika berbicara soal perebutan kekuasaan, politik identitas sering kembali digunakan sebagai alat propaganda. Pola ini mengulang memori masa lalu dan

mengangkat perbedaan-perbedaan identitas sebagai cara meraih dukungan. Di sisi lain, hubungan antara agama dan politik di Indonesia memang sangat dekat. Politik pada dasarnya bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera sesuatu yang juga diharapkan oleh ajaran agama. Sejak awal, agama hadir bukan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga untuk menghadirkan kebaikan bagi kehidupan bersama (Rambe & Mayasari, 2022).

Praktik politik identitas di Indonesia sering kali menggunakan latar belakang agama, mengingat tingkat religiositas masyarakat di Indonesia cukup tinggi dibanding negara-negara lain (El Hafiz & Aditya, 2021). Hal ini berdampak pada munculnya rasa persamaan keyakinan mendorong seseorang mudah sekali terpengaruh. Politik identitas, khususnya yang berbasis pada agama, merupakan fenomena yang terus hadir dan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dinamika politik di Indonesia. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 menjadi contoh nyata dari praktik politik identitas di Indonesia. Pada saat itu, pernyataan kontroversial dari salah satu calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menyebutkan "*Jangan mau dibohongi dengan surat Al-Mā'idah ayat 51,*" memicu polemik besar di tengah masyarakat. Ucapan tersebut dianggap menyinggung umat Islam dan menyulut gelombang kemarahan, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap citra politik Ahok, khususnya di mata pemilih Muslim. Kasus ini menunjukkan bagaimana identitas agama dapat dimobilisasi untuk membangun atau bahkan meruntuhkan dukungan politik. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi pisau bermata dua: dapat memperkuat basis dukungan jika digunakan secara tepat, namun juga berpotensi menjadi bumerang ketika menyinggung sensitivitas identitas lain. Banyak pengamat kemudian menilai bahwa peristiwa tersebut menandai meningkatnya potensi konflik antara negara dan agama, terutama jika dilihat dari tingginya eskalasi politik dan polarisasi yang terjadi selama masa pemilihan (Firdaus & Andriyani, 2021).

Politik identitas ternyata tidak hanya muncul dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, tetapi juga kembali mewarnai pemilihan presiden pada tahun 2019. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Jokowi menyampaikan bahwa keputusannya didasarkan pada masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para ulama, pimpinan partai politik, pengurus partai, hingga para relawan. Ma'ruf Amin dipilih karena dianggap sebagai sosok ulama yang bijaksana serta memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Keputusan tersebut dapat dilihat sebagai strategi politik yang mempertimbangkan faktor agama sebagai bagian penting dalam menghadapi dinamika politik identitas. Dengan menggandeng tokoh agama berpengaruh, Jokowi dinilai berupaya meredam isu-isu sektarian yang mungkin dimunculkan oleh lawan politiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa agama tetap menjadi elemen strategis dalam pertarungan politik di Indonesia (Firdaus & Andriyani, 2021). Dengan demikian, identitas agama menjadi salah satu isu sensitif dan besar pengaruhnya bagi perpolitikan di negara Indonesia.

Politik Identitas Perspektif Buya Syafii Maarif

Konstruksi masyarakat yang beragam membuat politik identitas dalam kontestasi pemilu sering kali muncul ke permukaan. Dalam praktiknya, politik identitas di Indonesia lebih cenderung bermuatan isu etnis, agama dan ideologi. Kemunculan politik identitas di Indonesia dibarengi dengan eksistensi kelompok-kelompok radikal dan semi-radikal yang mengatasnamakan Islam, yang mana dalam konteks ini Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Gerakan-gerakan semacam ini berpotensi untuk menimbulkan ancaman tersendiri bagi pluralisme. Secara ideologis gerakan ini mampu menimbulkan gerakan Islamisasi yang dapat menggeser ideologi bangsa (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2010).

Keberagaman struktur sosial masyarakat Indonesia menjadi faktor yang mendorong kemunculan politik identitas dalam berbagai kontestasi elektoral. Dalam praktiknya, politik identitas di Indonesia kerap kali mengandung muatan isu-isu yang berkaitan dengan etnis, agama, dan ideologi. Fenomena ini turut disertai dengan munculnya kelompok-kelompok radikal maupun semi-radikal yang mengatasnamakan Islam, agama mayoritas di Indonesia. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut memiliki potensi untuk mengancam keberlangsungan pluralisme di Indonesia. Secara ideologis, gerakan-gerakan ini dapat mendorong agenda Islamisasi yang, dalam jangka panjang, berpotensi menggeser dan mendestabilisasi ideologi kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

Menurut Buya Syafii Maarif, politik identitas dalam bentuk apa pun sebenarnya tidak akan membahayakan persatuan bangsa dan keutuhan negara selama nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh para pendiri bangsa benar-benar dijalankan. Nilai-nilai seperti semangat persatuan, integrasi nasional, jiwa Sumpah Pemuda yang melampaui perbedaan suku dan budaya, serta Pancasila sebagai dasar negara, tidak cukup hanya dijadikan simbol, tetapi harus dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang justru menjadi ancaman serius adalah ketika sebagian elite politik hanya mengejar kekuasaan tanpa peduli pada moral dan arah kebangsaan. Sikap sempit seperti ini menjadi persoalan besar yang dapat menghambat masa depan bangsa, tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa depan (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2010).

Menurut Buya Syafii Maarif, politik identitas pada dasarnya tidak serta-merta menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan keutuhan negara, selama nilai-nilai fundamental yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai seperti semangat persatuan, integrasi nasional, jiwa Sumpah Pemuda yang menekankan kebersamaan lintas suku dan budaya, serta Pancasila sebagai dasar negara, tidak cukup hanya dijadikan simbol normatif, melainkan harus diinternalisasi dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Buya Syafii menegaskan bahwa ancaman sesungguhnya muncul ketika sebagian elite politik mempraktikkan politik kekuasaan yang pragmatis dan mengabaikan etika serta arah moral kebangsaan. Orientasi politik

yang sempit dan utilitarian semacam ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan politik, serta menghambat pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Implikasi Politik Identitas Terhadap Keberagaman

Fenomena politik identitas berbasis keagamaan memiliki daya tarik elektoral yang tinggi, karena mampu membangun kedekatan emosional dengan konstituen, terutama umat beragama. Instrumentalisasi simbol keagamaan dalam konteks ini tidak semata berfungsi sebagai ekspresi ideologis, melainkan juga sebagai strategi politik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik. Akan tetapi, praktik politik identitas semacam ini telah mendorong terjadinya polarisasi sosial yang melampaui batas-batas arena politik dan menjalar ke ranah kehidupan masyarakat secara luas. Polarisasi tersebut memperkuat stereotip negatif antar kelompok sosial, memperdalam segregasi, dan menciptakan jarak sosial yang signifikan, yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial serta memicu konflik horizontal yang kompleks dan sulit direkonsiliasi. Dengan demikian, politik identitas agama tidak hanya menciptakan fragmentasi dalam tatanan politik, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Rahmadhani et al., 2024).

Implikasi politik identitas tidak hanya terbatas pada aspek relasi sosial, tetapi juga termanifestasi dalam proses formulasi kebijakan publik di tingkat negara. Dalam praktiknya, sejumlah kebijakan pemerintah menunjukkan indikasi keberpihakan atau pengaruh terhadap identitas-identitas primordial tertentu, seperti agama maupun etnis. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, khususnya ketika pertimbangan identitas dijadikan landasan normatif dalam pengambilan keputusan yang seharusnya bersifat inklusif dan berorientasi pada kepentingan kolektif. Isu-isu keagamaan secara khusus kerap menjadi arena kontestasi politik yang intens dan memicu disrupsi dalam diskursus kebangsaan, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik nasional. Lebih jauh, dialektika antara identitas keagamaan dan nasionalisme cenderung mengalami friksi yang semakin tajam, di mana keduanya diposisikan secara dikotomi. Polarisasi identitas yang demikian, jika dibiarkan berkembang tanpa intervensi struktural dan pendekatan dialogis yang konstruktif, dapat memperlemah fondasi integrasi nasional dan mengancam kesinambungan negara-bangsa yang demokratis, pluralistik, dan berkeadilan (Syahdan, 2024).

Politik identitas di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada populisme dengan muatan sentimen keagamaan, sebagaimana tergambar dalam kontestasi politik pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Dalam konteks ini, pertarungan politik berlangsung secara bipolar antara dua kekuatan ekstrem berbasis identitas, yang secara implisit maupun eksplisit menegasikan ruang bagi posisi moderat (*wasathiyah*) atau pendekatan "jalan tengah" (*middle way*) yang mengedepankan nalar kritis dan kedewasaan berpikir. Polarisasi tersebut melahirkan logika dikotomi yang menuntut keberpihakan mutlak, sehingga sikap netral atau moderat justru dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Akibatnya, iklim demokrasi mengalami

defisit ruang dialogis yang sehat dan konstruktif. Sebaliknya, tensi sosial semakin meningkat ditandai oleh menguatnya prasangka, intoleransi, dan kebencian antar kelompok, yang secara gradual menggerus fondasi persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, politik identitas juga melahirkan konfigurasi relasi kuasa yang timpang antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang dalam praktiknya menyerupai bentuk tirani spiritual. Dalam situasi ini, kelompok mayoritas cenderung mengeksploitasi posisi demografis dan simbolik mereka untuk meraih keuntungan politik, antara lain melalui slogan eksklusif seperti “pilih yang mayoritas.” Pola ini mencerminkan upaya sistematis dari elite politik untuk mereproduksi dominasi kekuasaan dengan memanfaatkan identitas sebagai instrumen mobilisasi massa dan legitimasi kekuasaan. Strategi *power sharing* yang dibangun di atas dasar identitas primordial semacam ini bukan hanya merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi, tetapi juga memperkuat fragmentasi sosial yang berisiko terhadap integrasi nasional dalam jangka panjang (Wingarta et al., 2021).

Politik identitas berpotensi menjadi hambatan serius bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketika perbedaan identitas terus dieksploitasi untuk kepentingan politik sempit, ruang-ruang dialog dan kerja sama lintas kelompok menjadi semakin sempit. Akibatnya, bukan hanya stabilitas sosial yang terganggu, tetapi juga kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat turut terhambat. Salah satu narasi yang kerap digunakan untuk memperkuat dominasi politik adalah konstruksi pemikiran “mayoritas yang merasa terpinggirkan,” yang sesungguhnya tidak mencerminkan realitas, tetapi diciptakan untuk membangun solidaritas semu dan memperkuat klaim kekuasaan. Untuk mengurangi dampak negatif ini, perlu dibangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak terjebak dalam logika identitas yang eksklusif. Negara dan seluruh elemen masyarakat harus mendorong terciptanya ruang dialog yang terbuka, jujur, dan setara sebagai fondasi penting bagi terwujudnya keadilan, kesetaraan hak, serta partisipasi aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif (Oktaviani & Maulia, 2024).

Fenomena politik identitas di Indonesia merupakan dinamika yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kebangsaan dan keberagaman masyarakatnya. Dalam konteks negara yang multikultural dan religius seperti Indonesia, politik identitas sering kali muncul sebagai respons terhadap ketimpangan, marginalisasi, maupun sebagai strategi untuk meraih kekuasaan. Identitas yang dibangun atas dasar agama, etnis, maupun ideologi menjadi instrumen yang ampuh dalam kontestasi politik, terutama ketika digunakan untuk membangun kedekatan emosional dengan konstituen. Namun, praktik semacam ini juga membawa implikasi serius terhadap kohesi sosial dan stabilitas nasional. Dalam konteks sejarah, politik identitas telah memainkan peran penting sejak awal pembentukan bangsa ini. Ketegangan antara nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan identitas ideologis bisa menciptakan friksi dalam proses perumusan dasar negara. Meski kemudian lahir konsensus melalui Pancasila, bukan berarti persoalan identitas

selesai. Justru seiring berkembangnya demokrasi pasca-Orde Baru, ruang ekspresi identitas menjadi semakin terbuka, tetapi juga membuka peluang politisasi yang eksploitatif terhadap simbol-simbol keagamaan dan budaya lokal.

Kesimpulan

Buya Syafii Maarif melihat politik identitas dari sudut pandang yang lebih etis dan filosofis. Menurutnya, politik identitas tidak harus menjadi ancaman bagi integrasi bangsa jika dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kebangsaan seperti Pancasila, semangat Sumpah Pemuda, dan cita-cita persatuan Indonesia. Masalah utama justru terletak pada sikap elite politik yang pragmatis dan cenderung memeralat identitas demi kekuasaan jangka pendek. Buya Syafii menekankan bahwa persoalan kebangsaan tidak boleh dikotomi hanya pada identitas agama atau etnis, tetapi harus dilihat dari aspek tanggung jawab moral terhadap bangsa secara keseluruhan.

Implikasi dari politik identitas tidak hanya mencakup polarisasi sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan publik, dinamika demokrasi, dan hubungan antar kelompok masyarakat. Ketika agama atau etnis dijadikan alat mobilisasi kekuasaan, maka yang muncul adalah eksklusivisme, stereotip, dan prasangka, yang berujung pada menguatnya intoleransi dan disintegrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi, menghancurkan ruang dialog, dan meminggirkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi pilar kehidupan berbangsa. Maka dari itu, politik identitas harus disikapi dengan bijak dan proporsional. Negara harus hadir sebagai penengah yang adil dengan menciptakan regulasi yang menjamin inklusivitas dan kebhinekaan. Di saat yang sama, masyarakat sipil, termasuk tokoh agama, intelektual, dan aktivis harus berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif agar perbedaan identitas tidak dijadikan alasan untuk menciptakan konflik dan dominasi. Dalam hal ini, pemikiran Buya Syafii Maarif menawarkan perspektif yang moderat, integratif, dan nasionalistis sebagai pijakan untuk membangun politik yang bermoral dan berkeadaban dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agius, C., & Keep, D. (2018). *The Politics of Identity: Place, Space and Discourse*. Manchester University Press.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (2010). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- antaranews.com. (2024, February 8). *1.111 kiai se Jawa Barat dukung Anies-Muhaimin*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3953964/1111-kiai-se-jawa-barat-dukung-anies-muhaimin>

- Baidhawi, A., & Novianti. (2022). Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2).
- Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed., with a new preface). Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2011). *The Power of Identity*. John Wiley & Sons.
- Dinar Astuti, Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). Politik Identitas dalam Kontroversi Isu Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(6), 1769–1778. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>
- El Hafiz, S., & Aditya, Y. (2021). Kajian Literatur Sistematis Penelitian Religiusitas di Indonesia: Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta Rekomendasi. *Indonesian Journal for The Psychology of Religion*, 1(1). <https://doi.org/10.24854/ijpr428>
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, dan Etnis di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2), 47–52. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>
- Fitriana, R. T., & Budyatmojo, W. (2022). Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2014. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2).
- Hawati, D. M. S., Maulana, D. A., Nurhafri, E. P., & Nurjaman, A. R. (2024). Dampak Politik Identitas Keagamaan dalam Perspektif Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(3).
- Hermansyah, Y. (2022). Politik Identitas Lokal dalam Proses Demokrasi Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 14(02), 139–158. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3236>
- Ismail, A., & Hana, M. Y. (2024). Pandangan Buya Syafii Maarif Tentang Hubungan Agama dan Negara. *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1), 33–38.
- Kemenag. (n.d.). *Buya Syafii Maarif, Pemikir Bangsa Cendekiawan Bersahaja*. <https://kemenag.go.id>. Retrieved June 4, 2024, from <https://kemenag.go.id/opini/buya-syafii-maarif-pemikir-bangsa-cendekiawan-bersahaja-ay1qwf>
- Mubarok, S. (2023). Akar Politik Identitas di Indonesia. *JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 6.
- Muhammadiyah, P. (2022, May 27). Profil Singkat Buya Syafii Maarif. *Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/2022/05/profil-singkat-buya-syafii-maarif/>

- Oktaviani, Y., & Maulia, S. T. (2024). Kekuasaan Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 126–130. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.286>
- Panjaitan, P. A., Ramadhania, J. A., LumbanGaol, R. S., Sidebang, D. D., & Ivanna, J. (2023). Analisis Politik Identitas Terhadap Pemilu (Studi Kasus Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6885>
- Rahmadhani, A., Tarigan, F. S. B., Gorat, L. M. B., Sinaga, N. N., & Zai, F. P. D. (2024). Politik Identitas dan Polarisasi Dalam Pemilu. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 364–369. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671>
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik Identitas dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 91–105. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>
- Samsu. (2007). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Meethods serta Research& Development)* (Vol. 1). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Supratikno, A. (2023). *Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia*. 1(1).
- Syahdan, M. S. (2024). Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 180–193. <https://doi.org/10.32332/0tjv3a81>
- Topo Santoso, Ida Budiarti. (2018). *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Indonesia. *Jurnal LEMHANAS: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 4(9).